

RENCANA KERJA TAHUNAN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



RENCANA KERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

		6.	5.	.4	я	Ь		ح.	NO
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Advokasi dan Sengketa Hukum	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	Penguatan kualitas Peraturan Perundang- Undangan		Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	KEGIATAN	
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan	Tersusunnya laporan pertanggung- jawaban penggunaan anggaran	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Terlaksananya Layanan Administrasi kepemiluan	Terlaksananya Penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan Hukum	Terbentuknya Informasi dan Publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan untuk masyarakat	Telaksananya penyusunan peraturan perundang - undangan yang berkualitas sesuai	inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan	SASARAN KEGIATAN
Persentase yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Persentase KPU Provinsi dan KPU/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase satker mampu melakukan layanan administrasi kepemiluan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Persentase penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	TARGET
Laporan Pengelolaan Barang Milik	Laporan Pertanggungjawab an Penggunaan Anggaran (LPPA)	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Laporan Layanan Administrasi kepemiluan		SOP dalam memberikan Informai	Rancangan peraturan perundang- undangan	Layanan pengadaan logistik Pemilu	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	OUTPUT KEGIATAN
Persentase jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN	Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase satker mampu melakukan layanan administrasi kepemiluan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	Persentase pengelolaan Data informasi tahapan Pemilu /Pemilihan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi	Persentase satker yang mampu melakukan pengadaan logisik Pemilu/Pilkada sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	Persentase satker yang mampu melakukan pengelolaan data kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan, kebutuhan dan anggaran yang tersedia	INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN
%06	%56	%001	100%	%06	100%	100%	80%	100%	TARGET OUTPUT KEGIATAN
1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Layanan PPID	1 Rancangan	1 Layanan Pengadaan	4 Dokumen	ОИТРИТ
		Rp. 5.170.255.000	Rp. 126.468.000	Rp. 29.588.000	Rp. 215.000.000	Rp. 17.190.000		Rp.101.193.000	ALOKASI

10.	9.		8.		7.
Data dan Informasi	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian		Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Organisasi
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Terlaksananya Layanan Pengadaan PNS Secara Transparan dan Akuntabel Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	perundang yang berlaku Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas
Persentase sarana dan prasarana Teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik Persentase fasilitas perkantoran untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel Persentase Pegawai yang Tercatat dalam <i>Data Base</i> Kepegawaian Secara Akurat	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu Persentase Pengenaan Disiplin atas Pelanggaran Disiplin Pegawai	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Persentase Kesesuaian Program dan Kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan
100%	100%	100%	97,5% 90%	85% 75%	100%
Aplikasi KPU yang diterapkan secara integrasi	Layanan Perkantoran	Layanan pengadaan pegawai baru Dokumen kepegawaian	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja Laporan kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Negara sesuai dengan peraturan dan perundang yang berlaku Dokumen Perencanaan Anggaran
Persentase dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik	Tersusunnya Kebutuhan Pegawai serta hasil rekruitmen yang transparan Persentase Pegawai yang Tercatat dalam Data Base Kepegawaian Secara Akurat	Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	yang Datanya sesuai dengan SAK Persentase KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota yang merencanakan program dan anggaran tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran
100%	100%	100%	97,5%	85% 75%	100%
1 Layanan	1 Layanan	1601 orang 1 Dokumen	1 Laporan	2 Laporan 1 Laporan	1 Dokumen
Rp. 45.166.000	Rp 1.154.429.000		Rp.34.320.000		Rp. 30.674.000

